

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Kebijakan Pendidikan
 - a. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan merupakan istilah yang sering kali kita dengar dalam konteks pemerintahan atau berpolitikan. Istilah kebijakan memiliki cakupan yang sangat luas. Kata “*policy*” yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administrasi pemerintah.¹

Istilah kebijakan (*Policy*) sering kali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*).² Kedua istilah ini memang hampir sama dari segi pengucapan. Namun sebenarnya kedua istilah ini mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. Kebijakan didasari oleh pertimbangan akal dalam proses pembuatannya. Akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam

¹H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 37

²H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 16

mengambil keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sedangkan kebijaksanaan lebih terpengaruh faktor emosional dalam prosesnya. Suatu kebijaksanaan bukan berarti tidak mengandung unsur-unsur rasional di dalamnya. Barangkali faktor-faktor tersebut belum tercapai pada saat itu atau merupakan intuisi.

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip dalam buku *Administrasi Pendidikan Kontemporer* karya Syaiful Syagala diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.³

Dalam buku *Analisis kebijakan Pendidikan*, Nanang Fatah mengutip pendapat Hogwood dan Gun yang membedakan kebijakan sebagai label untuk bidang kegiatan. Kebijakan sebagai suatu ekspresi umum dari tujuan umum atau keadaan yang diinginkan. Kebijakan

³ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.97

sebagai proposal khusus, kebijakan sebagai keputusan pemerintah, kebijakan sebagai otorisasi formal, dan kebijakan sebagai program.⁴

Berikut ini adalah definisi kebijakan menurut para ahli:

- 1) Pendapat Eaulau dan Prewitt dikutip oleh H.M. Hasbullah yang menjelaskan bahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.⁵
- 2) Pendapat Duke dan Canady dikutip oleh Mudjia Rahardjo yang mengelaborasi konsep kebijakan dengan delapan arah pemaknaan kebijakan, yaitu 1) kebijakan sebagai penegasan maksud dan tujuan, 2) kebijakan sebagai sekumpulan keputusan lembaga yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, mempromosikan, melayani, dan lain-lain pengaruh dalam lingkup kewenangannya, 3) kebijakan sebagai suatu panduan tindakan diskresional, 4) kebijakan sebagai suatu strategi yang diambil untuk

⁴Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 135

⁵H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hlm. 37

memecahkan masalah, 5) kebijakan sebagai perilaku yang bersanksi, 6) kebijakan sebagai norma perilaku dengan ciri konsistensi, dan keteraturan dalam beberapa bidang tindakan substansif, 7) kebijakan sebagai keluaran sistem pembuatan kebijakan, 8) kebijakan sebagai pengaruh pembuatan kebijakan, yang menunjuk pada pemahaman khalayak sasaran terhadap implementasi sistem.⁶

- 3) Pendapat Koontz dan O'Donnell dikutip oleh Syaiful Syagala mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomani pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki esensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.⁷

Berbagai pendapat mengenai kebijakan di atas dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan didasarkan pada suatu ketentuan dari pimpinan yang berbeda dari aturan yang ada dan dikenakan seseorang karena adanya

⁶Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 3

⁷Syaiful Syagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, .. hlm.97

alasan yang dapat diterima seperti untuk tidak memberlakukan aturan yang berlaku karena suatu alasan yang kuat.

Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersarakan dua hal. Pertama, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuatan kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional, karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan *problem*.

Kebijakan dalam konteks ini adalah kebijakan yang terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang diupayakan oleh siapa pun, terutama negara. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan ilmu pengetahuan. Dilihat dari makna sempitnya, pendidikan identik dengan sekolah. Berkaitan dengan hal ini, pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan sekolah sebagai lembaga mendidik. Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja (usia sekolah) yang diserahkan kepada pihak sekolah agar mempunyai kemampuan kognitif dan

kesiapan mental yang sempurna dan kesadaran maju yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial, dan memikul tanggung jawab mereka sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.⁸

Sekolah sebagai lembaga harus menjadi tempat berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku. Sekolah hendaknya dirancang seperti halnya dengan para insinyur yang bekerja merancang mesin yang canggih. Sekolah sebagai berlangsungnya proses rekayasa perubahan tingkah laku harus didasarkan kurikulum yang dirancang secara ilmiah dan bentuk-bentuk kegiatannya harus diorganisasikan dengan penuh perhatian dan dilaksanakan dengan penuh disiplin. Kaitannya dengan pendidikan, sekolah sebagai wadah yang tepat guna menumbuhkan tingkah laku/akhlak siswa.

b. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup rumusan, implementasi, dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi

⁸Nurani Soyomukti, *Teori-teori Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2010), hlm. 41

kebijakan. Proses analisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan.⁹

Analisis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk gambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuang dalam rumusan kebijakannya. Kemudian, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan tersebut, dikaji sampai pada ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan hambatan, halangan, gangguan dalam mengimplementasikan kebijakan yang dimaksud. Analisis selanjutnya diarahkan pada kajian implikasi-implikasi keilmuan untuk membangun paradigma baru dalam konsep dan teori kebijakan pendidikan. Pada tahapan ini, kebijakan dimaksudkan untuk menemukan konsep-konsep dalam rangka profesionalisasi manajemen pendidikan.

Implikasi-implikasi terhadap substansi manajemen pendidikan, perlu ditelusuri dari komponen-komponen yang melekat pada sistem pendidikan nasional, yang saat ini memikul beban berat dalam menanggulangi krisis multidimensional. Jika berangkat dari filosofi demokratisasi, pelayanan, dan meningkatkan peran serta

⁹ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 51

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang diwujudkan dalam misi dan tugas lembaga pendidikan, diperlukan suatu kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut merupakan standar, spesifikasi dan model normatif ini, dipakai untuk menseleksi bahan masukan untuk diproses sehingga menghasilkan keluaran sebagaimana keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat dan bangsa.¹⁰

c. Proses Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan suatu yang sifatnya esensial dan komprehensif. Kebijakan yang dibuat ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan yang sifatnya pelik. Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak-pihak tertentu. Demikian pula halnya dengan kebijakan pendidikan, hendaknya harus mempertimbangkan banyak hal, karena menyangkut kepentingan publik yang dampaknya sangat besar.¹¹

¹⁰ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan : Konsep, Teori dan Model*,, hlm. 52

¹¹H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*,, hlm. 63

Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan rumit jika dibandingkan dengan problema yang hendak dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dibuat haruslah mendorong produktivitas, kualitas, dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien. Syaiful Syagala mengemukakan dalam bukunya yang berjudul “Administrasi Pendidikan Kontemporer” bahwa secara umum terdapat pendekatan yang digunakan dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:¹²

1) Pendekatan Empirik (*Empirical Approach*)

Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan tertentu dalam bidang pendidikan yang bersifat faktual dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif dan prediktif. Analisa kebijakan secara empirik diharapkan akan menghasilkan dan memindahkan informasi penting mengenai nilai-nilai, fakta-fakta, dan tindakan pendidikan.

¹²Syaiful Syagala. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, .. hlm.99

2) Pendekatan Evaluatif (*Evaluatif Approach*)

Evaluasi menurut Imron adalah “salah satu aktivitas yang bermaksud mengetahui seberapa jauh suatu kegiatan itu dapat dilaksanakan ataukah tidak, berhasil sesuai yang diharapkan atau tidak”. Penekanan pendekatan evaluatif ini terutama pada penentuan bobot atau manfaatnya (nilai) beberapa kebijakan menghasilkan informasi yang bersifat evaluatif. Evaluasi terhadap kebijakan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif yaitu bagaimana nilai suatu kebijakan dan menurut nilai yang mana kebijakan itu ditentukan.

Evaluasi kebijakan organisasi merupakan aktivitas untuk mengetahui seberapa jauh kebijakan benar-benar dapat diterapkan dan dilaksanakan serta seberapa besar dapat memberikan dampak nyata memenuhi harapan terhadap khalayak sesuai yang direncanakan.

Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung sama lainnya diatur menurut

urutan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sebuah kebijakan akan mudah dipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna serta kajiannya sangat dinamis.

Tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda kebijakan adalah langkah pertama yang sangat penting dalam pembuatan kebijakan. Tahapan ini merupakan langkah kunci yang harus dilalui sebelum isu kebijakan diangkat dalam agenda kebijakan pemerintah dan akhirnya menjadi suatu kebijakan.

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang strategis dalam realitas kebijakan publik. Proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik. *Top leader* menyiapkan rancangan undang-undang dan

mengirimkan ke staf untuk dibicarakan atau dimusyawarahkan.¹³

b. Formulasi kebijakan

Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah menjadi agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis, dibandingkan dengan tahapan penyusunan agenda yang lebih bersifat politis, dengan menerapkan berbagai teknik analisis untuk membuat keputusan yang baik. Model-model ekonomi dan teori pengambilan keputusan merupakan analisis yang berguna untuk mengambil keputusan yang terbaik dan meminimalkan resiko kegagalan.

Beberapa kegiatan yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan yang baik, yaitu: (1) rumusan kebijakan pendidikan tidak mendiktekan keputusan spesifik atau hanya menciptakan lingkungan tertentu, (2) rumusan kebijakan dapat dipergunakan menghadapi masalah atau situasi yang timbul secara berulang.

¹³ Fatkuroji “*Analisis Implementasi Kebijakan Pembelajaran Terpadu Terhadap Minat Konsumen Pendidikan: Studi SDIT Bina Amal dan SD Al- Azar 29BSB Semarang*, (Semarang: UIN Walisongo, 2012), hlm. 21

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah.

3) Adopsi/ Legitimasi Kebijakan

Legitimasi berasal dari kata "*legitimacy*" yang berarti memberi kuasa atau kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, termasuk proses penyusunan perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat. Kata legitimasi juga berasal dari kata "*legitimation*" yang artinya suatu proses khusus dimana program-program pemerintah diabsahkan.

Legitimasi merupakan tahapan yang penting karena akan membawa pengaruh terhadap masyarakat banyak, baik yang menguntungkan sebagian masyarakat maupun yang merugikan kelompok lain. Selain itu, setiap kebijakan juga membawa implikasi terhadap anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah.

Kebijakan yang sudah diformulasikan harus dilegitimasi terlebih dahulu sebelum diimplementasikan di masyarakat. Legitimasi kebijakan artinya alternatif kebijakan yang

diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga pendidikan.

Proses kebijakan memerlukan legitimasi guna memerlukan legitimasi guna memperoleh pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat sangat penting, agar ketika kebijakan pendidikan akan dilaksanakan tidak mengalami penolakan dari masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaannya, maka kebijakan tersebut dinilai semakin sukses.

Bentuk pengakuan masyarakat atas kebijakan dapat berupa pengabsahan dan otorisasi. Pengabsahan adalah suatu proses dimana kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan diabsahkan. Sedangkan otorisasi adalah kewenangan untuk memberlakukan sebuah kebijakan. Dari otorisasi atau kewenangan inilah maka muncul tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan kewenangan yang diberikan kepadanya. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.

4) Implementasi Kebijakan

Menurut Richard Gorton dan Scheneider
“Implementing involves administrators in the process

of making sure that the plant is carried out as intended."¹⁴ Artinya implementasi melibatkan seorang administrator pada proses memastikan rencana berjalan sesuai yang dikehendaki. Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan. Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tahap implementasi. Sebaik apapun kebijakan pendidikan yang sudah dibuat jika tidak diimplementasikan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh

¹⁴Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*, (New York: Wm.C. Brown Publisher, 1991), hlm. 65

terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah ditetapkan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

Proses implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik, sosial, hukum, maupun administratif atau organisasi dalam rangka mencapai suksesnya implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program.

Sebuah kebijakan perlu dijabarkan secara operasional tujuan umum menjadi tujuan khusus yang

lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu perlu adanya pengaturan sumber dana, sumber daya, serta perangkat organisasi lainnya. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, M. Hasbullah mengutip pendapat Siagian yang mengemukakan perlu perhatian terhadap hal-hal yang berpengaruh antara lain; (1) manusia, (2) struktur, (3) proses administrasi dan manajemen, (4) dana, (5) daya. Lima faktor tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.¹⁵

Suatu tindakan administratif sangat diperlukan untuk upaya pelaksanaan kebijakan. Agar implementasi kebijakan dalam pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses, maka perlu dianalisis tentang peraturan yang dapat mendukung kebijakan, keuangan, personil, dan prasarana lainnya yang dapat mendukung suatu pelaksanaan kebijakan. Banyak pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan seperti: kelompok formal, informal, suprastruktur, infrastruktur, dan fungsional. Semua itu saling terkait

¹⁵H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*, hlm. 93

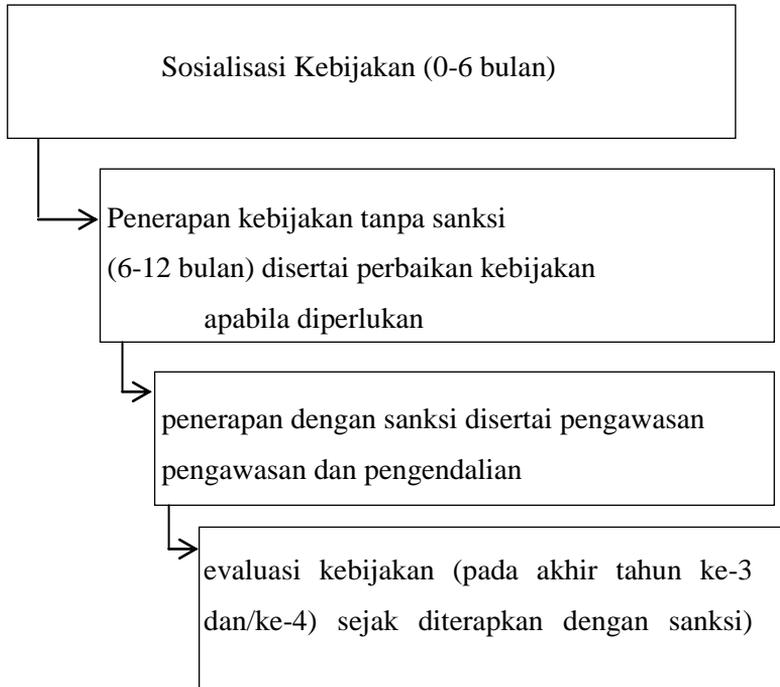
dan sangat menentukan akan keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Proses penetapan kebijakan bisa mulai apabila tujuan dan sasaran telah diperinci.

Proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program. Untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlu adanya kesamaan pandangan atas tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaannya.

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dengan rumusan kebijakan, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Apabila kebijakan tidak sesuai dengan rumusan, tujuan, dan sasaran maka dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut adalah kurang berhasil, keberhasilan implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari dampak positif kebijakan tersebut bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Tata urutan dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat divisualisasikan sebagaimana tampak pada skema sebagai berikut:¹⁶



Gambar 2.1 Bagan Visualisasi tata urutan implementasi kebijakan pendidikan

¹⁶H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*,, hlm.101

- a) Penyiapan implementasi kebijakan pendidikan (0-6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijaksanaan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau birokrasi maupun masyarakat (publik). Tahapan sosialisasi dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media saat pertemuan langsung dengan masyarakat.
 - b) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu selam 6-12 bulan dan disertai perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan
 - c) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai pengawasan dan pengendalian.
 - d) Setelah dilakukan implementasi kebijakan pendidikan selama tiga tahun, dilakukanlah evaluasi kebijakan pendidikan.
- d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Kebijakan yang sudah dirumuskan tentunya akan melewati tahap implementasi. Agar sesuai dengan rencana, sasaran, dan tujuan maka perlu adanya monitoring serta evaluasi dari kebijakan yang sudah

diambil. Proses monitoring merupakan sebuah proses yang sangat penting karena akan memberikan informasi nyata terkait realita lapangan.

Monitoring kebijakan pendidikan adalah proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan. Monitoring merupakan pemantauan terhadap proses implementasi kebijakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan kebijakan mulai dari program, proyek, maupun kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Menurut Dunn ssebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah dalam buku Kebijakan Pendidikan, monitoring berfungsi sebagai berikut:

1) Ketaatan (*compliance*)

Menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua komponen yang terlibat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

2) Pemeriksaan (*auditing*)

Menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi target group telah mencapai sasaran atau belum.

3) Laporan (*accaounting*)

Menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan sebuah periode waktu tertentu.

4) Penjelasan (*explanation*)

Menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan mengapa tidak ada kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan.¹⁷

Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Sedangkan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan. Menurut Richard Gorton dan Scheneider “*evaluation can be defined as the process of examining as carefully, thoroughly, and objectively as possible an individual, group, product, or program to ascertain strengths and weaknesses*”.¹⁸ Artinya evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai secara teliti, menyeluruh, dan objektif secara individu atau

¹⁷H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*,, hlm. 113

¹⁸Richard A Gorton and Gail Thierbach Scheineder, *School Based Leadership: Challenges and Oppurtunities*,, hlm. 73

kelompok untuk mengetahui kelebihan atau kelemahan dari produk atau program. Evaluasi kebijakan lebih menekankan pada hasil dari suatu kebijakan apakah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan rencana, tujuan, maupun sasaran maka perlu ada langkah baru yang harus diambil untuk mengganti kebijakan yang dirasa gagal tersebut.

Hasil penilaian dari proses evaluasi dijadikan sebagai masukan atau umpan balik untuk merumuskan kebijakan selanjutnya. Evaluasi yang baik tidak hanya melihat pada hasil akhir saja, tetapi juga melihat pada setiap tahapan dalam proses kebijakan.¹⁹

e. Kendala dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan dalam tatanan kebijakan. Karena implementasi kebijakan merupakan proses yang sifatnya sangat penting. Dapat diibaratkan implementasi kebijakan adalah penentu suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Namun proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan

¹⁹ Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*..hlm. 9

tanpa hambatan. Terdapat beberapa kendala dalam proses implementasi kebijakan.

Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang oleh Dunsire yang dikutip hasbullah, dinamakan sebagai “*implementation gap*” yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan).

Menurut Pieters sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah bahwa sangat diperlukan instrumen untuk mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- 1) Hukum

Hukum menjadi instrumen yang berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Karena dalam hukum terdapat unsur paksaan dari pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa memiliki legitimasi untuk dapat melaksanakan suatu kebijakan yang dapat memaksa setiap anggota atau warga sekolah untuk mentaatinya. Sebagai instrumen kebijakan, hukum mempunyai kegunaan untuk mengatur kedudukan warga negara/ sekolah dan hukum merupakan alat pengatur kehidupan warga negara/ sekolah.

2) *Service*

Dalam implementasi kebijakan, birokrasi atau pemerintah dapat melakukannya dengan memberikan fasilitas ataupun layanan pendidikan.

3) *Dana*

Ketersediaan dana merupakan instrumen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya finansial yang cukup maka kebijakan akan berjalan dengan baik itu pada tahap makro maupun mikro.

4) *Situasi*

Apabila semua instrumen di atas gagal digunakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat menggunakan keyakinan moral untuk mempengaruhi masyarakat. Karena kedudukan pemerintah dan lembaga politik lain, sepanjang mereka masih memiliki legitimasi masyarakat, mereka mempunyai posisi yang menguntungkan untuk menumbuhkan keyakinan dalam mempengaruhi masyarakat, sebab mereka memiliki akses untuk berbicara atas nama kepentingan umum.²⁰

2. *Full day school*

²⁰ H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*,, hlm. 102

a. Konsep Dasar *Full Day School*

Sekolah sepanjang hari (*full day school*), merupakan program pendidikan yang seluruh aktivitasnya berada di sekolah sepanjang hari sejak pagi sampai sore. Dalam pengertian tersebut, makna sepanjang hari pada hakikatnya tidak hanya upaya menambah waktu dan memperbanyak materi pelajaran, namun *full day school* dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran dengan penambahan jam pelajaran agar siswa mampu mendalami sebuah mata pelajaran dengan jatah waktu yang proporsional selama sehari penuh. Di antaranya melalui pengayaan atau pendalaman materi pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum dan melalui pembinaan jiwa serta moral anak dalam bentuk pengayaan agama dan praktiknya sebagai pembiasaan hidup yang baik.²¹

Pada dasarnya *full day school* merupakan pengembangan dari kurikulum, jadi apapun yang menjadi alasan, tujuan maupun kurikulum tetap kembali pada ketetapan sekolah itu sendiri, karena penelitian berada

²¹Ragella Septiana, *Pengelolaan Pembelajaran Program Full Day School, Skripsi*, (Yogyakarta, Program Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), hlm. 29.
<http://eprints.uny.ac.id/22371/1/RAGELLA%20SEPTIANA.pdf>, diakses 27 mei 2017, pukul 11:49 WIB

pada sekolah islam terpadu maka kurikulum maupun tujuan mengacu pada SIT (Sekolah Islam Terpadu) itu sendiri, karena memang *full day school* bukanlah sistem yang berdiri sendiri melainkan hanya sebuah pengembangan strategi dari sebuah kurikulum.

b. Pembelajaran *Full Day School*

Dalam pembelajaran *full day school* lamanya waktu belajar tidak dikhawatirkan menjadikan beban karena sebagian waktunya digunakan untuk waktu-waktu informal. Secara utuh dapat dilihat bahwa pelaksanaan sistem pendidikan *full day school* mengarah pada beberapa tujuan, antara lain, 1) untuk memberikan pengayaan dan pendalaman materi pelajaran yang telah ditetapkan oleh diknas sesuai jenjang pendidikan, 2) memberikan pengayaan pengalaman melalui pembiasaan-pembiasaan hidup yang baik untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, 3) melakukan pembinaan kejiwaan, mental dan moral siswa disamping mengasah otak agar terjadi keseimbangan anatar kebutuhan jasmani dan rohani sehingga terbentuk kepribadian yang utuh, 4) pembinaan *spiritual intelegence* siswa melalui penambahan materi-materi agama dan kegiatan

keagamaan sebagai dasar dalam bersikap dan berperilaku²².

Dengan hal demikian, orang tua berharap agar anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu belajar di lingkungan sekolah dari pada di rumah dengan lingkungan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Dengan *full day school*, anak-anak seharian berada di lingkungan yang terlindungi dan dapat kembali di rumah setelah menjelang sore bersama orang tuanya yang sudah pulang kerja.

Full day school merupakan model sekolah umum yang memdukan sistem pengajaran Islam secara intensif yaitu dengan memberi tambahan waktu khusus untuk pendalaman keagamaan siswa. Biasanya jam tambahan tersebut dialokasikan pada jam setelah shalat dhuhur sampai shalat ashar, sehingga praktis sekolah model ini masuk jam 07.00 WIB pulang pada pukul 16.00 WIB. Sistem ini memiliki kurikulum inti yang sama dengan sekolah umumnya, serta diperkaya dengan kurikulum lokal.

²² Momy A. Hunowu, "*Konsep Full Day School dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan.*", *Jurnal Irfani*, (Vol. XII, No.1 Juni/2016), hlm. 119. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ir>. diakses 22 November 2016 pukul 22.03 WIB.

Full day school menerapkan suatu konsep dasar “*integrated-activity*” dan “*integrated-currikulum*”. Hal inilah yang membedakan dengan sekolah pada umumnya. Dalam *full day school* semua program kegiatan siswa di sekolah, baik belajar, bermain, beribadah dikemas dalam sebuah sistem pendidikan²³. Jika ditelaah, dalam pembelajaran dengan kebijakan *full day school*, terlihat bahwa anak akan banyak terlibat dalam kelas. Keterlibatan ini akan berakibat pada produktifitas yang tinggi. Bahkan siswa menunjukkan sikap yang lebih positif dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Hal tersebut bisa terjadi karena keseharian siswa berada di dalam kelas (lingkungan sekolah) dan dalam pengawasan guru.

Namun demikian, selain sisi-sisi positif tersebut, akan ditemukan pula sisi-sisi negatif yaitu panerapan kebijakan *full day school* sebenarnya akan melahirkan kejenuhan anak-anak yang terbiasa bermain liar di lingkungan sosialnya.

3. Akhlak
 - a. Pengertian akhlak

²³ Momy A. Hunowu, "*Konsep Full Day School dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan.*", *Jurnal Irfani*,, hlm.120

Akhlik secara etimologi berasal dari bahasa arab (أَخْلَاق) *akhlak* dalam bentuk jamak, sedangkan sedangkan *mufrodnya* adalah (خُلُق) *khuluqun* yang berarti *budi pekerti*, perangai, tingkah laku, tabiat. Berakar dari kata (خَلَق) *khalaqa* yang artinya menciptakan. Kemudian seakar dengan kata (خَلَق) *khaliq* yang artinya (pencipta) makhluk (yang diciptakan) dan (خَلْق) *khaliq* yang artinya penciptaan.²⁴

Sementara itu dari sudut terminologi (istilah), ada banyak pendapat yang mengemukakan istilah akhlak. Diantaranya adalah yang dikemukakan oleh beberapa ulama berikut ini:

1) Al-Ghazali

فَالْخُلُقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِحَةٌ عَنْهَا تَصْدِرُ الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ
وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ .

Artinya: “Akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.”²⁵

²⁴Nur Hidayat, *Akhlik Tasawuf*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 1

²⁵Nur Hidayat, *Akhlik Tasawuf*,, hlm. 4

Maka apabila sifat itu memunculkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan syariat maka sifat itu disebut akhlak yang baik, dan bila yang muncul dari sifat itu perbuatan-perbuatan buruk maka disebut akhlak yang buruk. Jadi sifat yang telah meresap dan terpatri dalam jiwa yang dapat menimbulkan perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi, itulah yang dinamakan *akhlak*.

2) Ibrahim Anis

الْخُلُقُ: حَالٌ لِلنَّفْسِ رَاسِخَةٌ، تَصْدُرُ عَنْهَا الْأَعْمَالُ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرُؤْيَةٍ

Artinya: Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya muncul macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan²⁶.

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa *al-khuluq* disebut sebagai kondisi atau sifat yang terpatri dan meresap dalam jiwa, sehingga si pelaku perbuatan melakukan sesuatu itu secara spontan dan tanpa dibuat-buat, karena seandainya ada orang yang mendermakan hartanya dalam keadaan

²⁶ Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 5

yang jarang sekali untuk dilakukan (mungkin karena terpaksa atau mencari muka), maka bukanlah orang tersebut dianggap dermawan sebagai cerminan dari kepribadiannya. Sifat yang telah meresap dan terpatrit dalam jiwa itu disyaratkan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan lagi.

3) Ibnu Maskawih

الْخُلُقُ حَالٌ لِّلنَّفْسِ دَاعِيَةٌ لَهَا إِلَى أَعْمَالِهَا مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ وَرُؤْيَةٍ

Artinya: Khuluq ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran²⁷.

Dijelaskan pula oleh Ibnu Maskawih bahwa keadaan gerak jiwa tersebut meliputi dua hal. *Pertama*, alamiah dan bertolak watak, seperti adanya orang yang mudah marah hanya karena masalah yang sangat sepele, atau tertawa berlebihan hanya karena mendengar berita yang tidak terlalu memprihatinkan. *Kedua*, tercipta melalui kebiasaan atau latihan. Pada awalnya keadaan tersebut terjadi karena dipertimbangkan dan dipikirkan, namun kemudian

²⁷²⁷Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*, hlm. 6

menjadi karakter yang melekat tanpa dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan manifestasi iman, islam dan ihsan yang merupakan refleksi sifat dan jiwa secara spontan yang terpola pada diri seseorang sehingga dapat melahirkan perilaku secara konsisten dan tidak tidak bergantung pada pertimbangan berdasar interes tertentu. Sifat dan jiwa yang melekat dalam diri seseorang menjadi pribadi yang utuh dan menyatu dalam diri orang tersebut sehingga akhirnya tercermin melalui tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari bahkan menjadi adat kebiasaan.

4) Ahmad Amin

الْخُلُقُ عَادَةٌ الْإِرَادَةُ

Artinya: *khuluq ialah membiasakan kehendak.*

Dimaksud dengan ‘*adah* (عَادَةٌ) ialah perbuatan yang dilakukan berdasarkan kecenderungan hati yang selalu diulang-ulang tanpa pemikiran dan pertimbangan yang rumit, sedangkan yang melakukan dengan *iradah* (الْإِرَادَةُ) ialah menangnya keinginan untuk melakukan sesuatu setelah mengalami kebimbangan untuk menetapkan pilihan terbaik diantara beberapa alternatif. Apabila *iradah*

sering terjadi pada diri seseorang, maka akan terbentuk pula pola yang baku, sehingga selanjutnya tidak perlu membuat pertimbangan-pertimbangan lagi, melainkan secara langsung melakukan tindakan yang sering dilaksanakan tersebut.²⁸

Makna kehendak dan kata kebiasaan dalam pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kehendak adalah ketentuan dari beberapa keinginan manusia setelah bimbang, sedangkan kebiasaan ialah perbuatan yang diulang-ulang sehingga mudah melakukannya. Masing-masing dari kehendak dan kebiasaan ini mempunyai kekuatan, kekuatan yang besar inilah dinamakan akhlak. Beberapa ciri dari akhlak yaitu:

- a) Akhlak mempunyai suatu sifat yang tertanam kuat dalam jiwa atau lubuk hati seseorang yang menjadi kepribadiaannya dan itu akan membuat berbeda dengan orang lain.
- b) Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan kata lain akhlak

²⁸Nur Hidayat, *Akhlak Tasawuf*,, hlm. 7

merupakan adat kebiasaan yang selalu dilakukan seseorang.

- c) Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa, atau mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang lain.
- d) Akhlak merupakan manifestasi dari perbuatan yang tulus, ikhlas, dan tidak dibuat-buat.

Dari beberapa definisi di atas pada hakikatnya *khuluq* atau akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari sini timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pikiran.

b. Dasar-dasar Akhlak

1) Al- Qur'an

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah.”

Ayat yang mulia ini merupakan prinsip utama dalam meneladani Rasulullah SAW. Baik dalam

ucapan, perbuatan, maupun perilakunya. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada manusia agar meneladani Nabi SAW. Dalam peristiwa al-Ahzab, yaitu meneladani kesabaran, upaya, dan penantiannya atas jalan keluar yang diberikan Allah SWT.²⁹

2) Hadits

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ. وَقَالَ أَبُو دَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا حِيَةَ: ارْكَبْ إِلَى هَذَا الْوَادِي فَاسْمَعْ مِنْ قَوْلِهِ، فَرَجَعَ فَقَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (اخرجه البخارى)³⁰

“Ibnu Abbas berkata, “Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan, beliau SAW lebih bersikap dermawan pada bulan Ramadhan.” Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika sampai kepadanya berita tentang diutusnya Nabi SAW, “Naikilah hewan tunggangan menuju lembah ini dan dengarkan perkataannya.” Maka dia kembali dan berkata, “Aku melihatnya telah memerintahkan akhlak yang mulia.” (HR. Bukhori)

²⁹ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj.Syihabuddin, (Jakarta, Gema Insani Press, 2000), jil. III, hlm. 840

³⁰E-book: Imam Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Bab 39, (Riyadh: baitul Al-Afkari Ad-Dauliyah, 1998), hlm.1168

Isi kandungan dari hadits tersebut yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA tentang sifat Nabi SAW yang pemurah/ dermawan.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَدَ النَّاسِ
(*Ibnu Abbas berkata, “orang yang paling dermawan.”*).

Riwayat ini sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) pada pembahasan tentang iman, dan telah dijelaskan pada pembahasan tentang puasa bahwa beliau lebih dermawan pada bulan Ramadhan.

Kedua, hadits Abu Dzar tentang kisahnya saat masuk islam.

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لَمَّا بَلَغَهُ مَبْعَثُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَخِيهِ الخ...

(*Abu Dzar berkata kepada saudaranya ketika sampai kepadanya tentang berita diutusnya Nabi SAW...*).

Demikian dinukil mayoritas periwayat, yakni mengulang kata ‘*qaala*’ (berkata), sementara dalam riwayat Al-Kasyamihami disebutkan أَبُو ذَرٍّ كَانَ... الخ (Adapun Abu Dzar...), dan versi ini lebih tepat. Ini adalah penggalan kisah Abu Dzar ketika masuk islam. Ia telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul*

secara panjang lebar pada pembahasan tentang diutusny Nabi SAW. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat *وَيَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ* (*Beliau memerintahkan kepada akhlak yang mulia*). Kata makaarim adalah bentuk jamak dari kata *makrumah* yang berasal dari kata *al karm*. Ar-Raghib berkata, “Ia adalah nama untuk akhlak (perangai), juga perbuatan-perbuatan yang terpuji.” Dia berkata, “Seseorang tidak dikatakan ‘*kariim*’ (mulia) hingga tampak hal itu dari dirinya. Perbuatan paling mulia adalah yang dilakukan untuk tujuan yang paling terhormat, sedangkan yang paling terhormat dari semua tujuan adalah ridha Allah, dan ini hanya didapatkan dari orang-orang yang yang bertkwa. Allah berfirman,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa*). Semua yang melebihi yang lain dalam bidangnya disebut ‘*kariim*’ (mulia).³¹

Jika telah jelas bahwa Al-qur’an dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap

³¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, terj.Amiruddin*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), jil.29, hlm. 189

muslim. Al-qur'an dan sunnah Rasul adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran manapun hasil renungan dan ciptaan manusia. Sehingga telah menjadi keyakinan islam bahwa akal manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-qur'an dan As-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk.

c. Ruang lingkup akhlak

Membahas persoalan ruang lingkup akhlak, menurut Kahar Masyhur sebagaimana yang dikutip oleh Nur hidayat menyebutkan bahwa ruang lingkup akhlak meliputi bagaimana seharusnya seseorang bersikap terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia seperti dirinya sendiri, terhadap keluarganya, serta terhadap masyarakatnya, disamping itu juga meliputi bagaimana seharusnya bersikap terhadap makhluk lain seperti terhadap malaikat, jin, iblis, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Sedangkan menurut Ahmad Basyir sebagaimana yang dikutip nur hidayat, menyebutkan cakupan akhlak meliputi semua aspek kehidupan manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai makhluk individu, makhluk sosial, makhluk penghuni, dan yang memperoleh bahan kehidupannya dari alam, serta sebagai makhluk ciptaan

Allah. Dalam islam, akhlak (perilaku) manusia tidak dibatasi pada perilaku sosial, namun juga menyangkut kepada seluruh ruang lingkup kehidupan manusia. Oleh karena itu konsep akhlak islam mengatur pola kehidupan manusia yang meliputi:

- 1) Hubungan antara manusia dengan Allah seperti akhlak terhadap Tuhan
- 2) Hubungan manusia dengan sesamanya yang meliputi hubungan seseorang terhadap keluarganya maupun hubungan seseorang terhadap masyarakat.
 - a) Akhlak terhadap keluarga yang meliputi: akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap istri, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak, dan anak terhadap sanak keluarga.
 - b) Akhlak terhadap masyarakat yang meliputi akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap tamu, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak, dan anak terhadap sanak keluarga.
- 3) Hubungan manusia dengan lingkungannya
Akhlak terhadap makhluk lain seperti akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap alam sekitar.

4) Akhlak terhada diri sendiri.³²

B. Kajian Pustaka

Dalam hal ini, penulis menemukan literatur yang di ambil dari skripsi terdahulu, yang dirasa penulis dalam pembahasan skripsi tersebut ada hubungannya dengan skripsi penulis, di antaranya yaitu :

1. Abu (2014) dengan judul “*Strategi Full Day School Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IX A DI MTs Al-Bukhary Labuhan Sreseh Sampang*”. Hasil penelitian tersebut yaitu, pihak sekolah menggunakan strategi dengan cara mengemas pola pembelajaran dengan format game/permainan, namun tetap mengandung unsur pendidikan yang artinya belajar sambil bermain “*my playing is my learning and learning is my playing*”. Selain itu, guru menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti *alphabetical learning*, tanya jawab, *matching card*, dan lain-lain, serta setting pembelajaran yang berbeda seperti di halaman sekolah dengan menciptakan suasana pembelajaran 3M (menyenangkan, mengasyikkan, dan mencerdaskan).³³

³² Nur Hidayat, *Akhlaq Tasawuf*,,hlm.23

³³ Abu Thaib, “*Strategi Full Day School Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Kelas IX A DI MTs Al-Bukhary Labuhan Sreseh Sampang*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Program Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim,n 2014), hlm, 78, <http://etheses.uin->

Penelitian tersebut berbeda dengan Penelitian skripsi ini, yaitu fokus yang diambil oleh Abu adalah full day school dalam meningkatkan prestasi siswa sedangkan peneliti fokus pada full day school dalam upaya membentuk akhlak karimah siswa.

2. Anshari (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Full Day School dalam Upaya Membentuk Empati siswa*”, hasil dari penelitian tersebut yaitu sekolah menerapkan beberapa kegiatan berupa pembiasaan untuk membentuk empati siswa meliputi penentuan menu makan yang sederhana, pembiasaan mengambil porsi makan sesuai jatah, pembiasaan membagikan makanan, berbaris dengan rapi, dan mengantri untuk berwudhu.³⁴

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, yaitu fokus yang diambil oleh Anshari adalah full day school dalam upaya membentuk empati siswa sedangkan peneliti fokus pada full day school dalam upaya membentuk akhlak karimah siswa

malang.ac.id/2917/1/07130064.pdf, diakses 06 Juni 2017, pukul 23.01 WIB.

³⁴Muhammad Iqbal Ansari, "*Strategi Sistem Full Day School dalam Membentuk Empati Siswa.*" *Muallimuna Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*1.1 (Vol. 1, No.1, Oktober), hlm. 74. <http://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php//muallimuna>, diakses 22 November 2016, pukul 22:17 WIB

C. Kerangka Berfikir

Dalam pembahasan tentang kerangka berfikir maka yang akan dibahas adalah tentang latar belakang kebijakan *full day school*, implementasi kebijakan *full day school*, serta dampak dari kebijakan *full day school* di SMP IT Permata Bunda Mranggen Demak.

Latar belakang kebijakan *full day school* salah satu masalah yang sering dikemukakan oleh para pengamat pendidikan Islam seperti adanya pergaulan siswa di luar sekolah yang kurang baik, sehingga mempengaruhi pembentukan akhlak siswa.

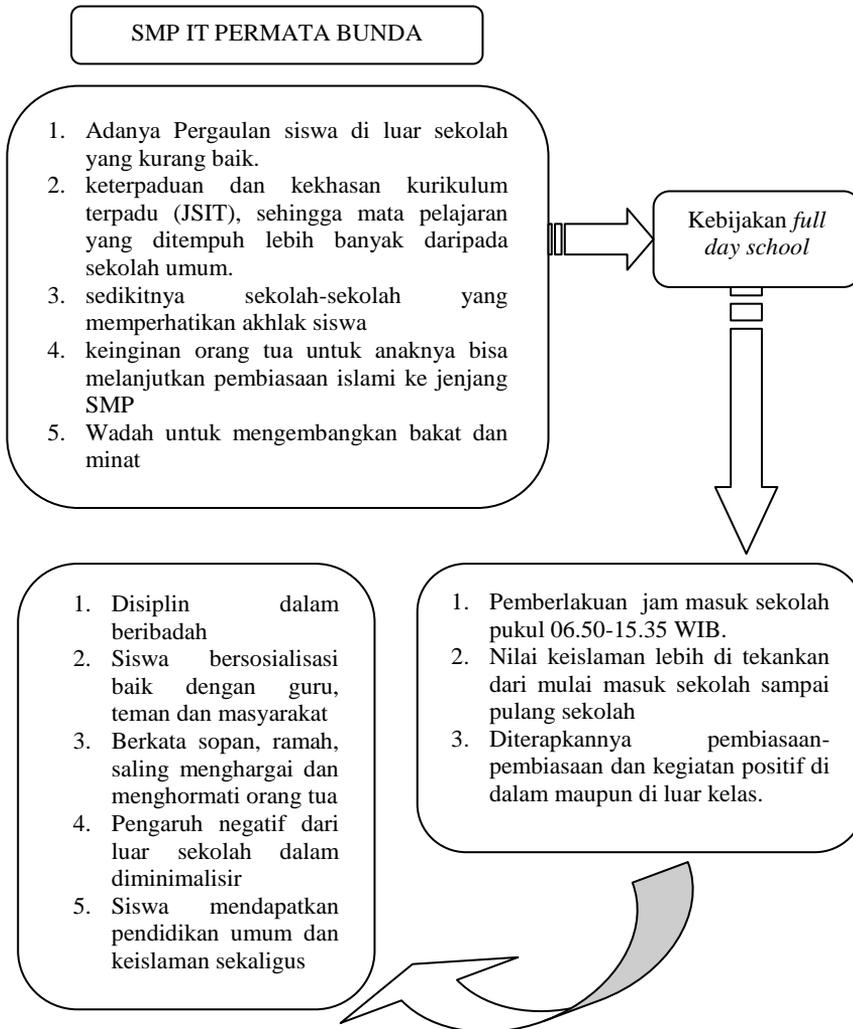
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka solusi yang ditawarkan di SMP IT Permata Bunda yaitu menerapkan kebijakan *full day school* untuk memecahkan masalah tersebut di atas dalam kaitannya membentuk akhlak karimah siswa.

SMP IT Permata bunda adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang menerapkan kebijakan *full day school* yang mana tujuan utamanya adalah di samping untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, *full day school* juga bertujuan untuk membentuk akhlak karimah siswa dengan dilakukan pembinaan khusus dalam bidang keagamaan di antaranya yaitu, pembinaan shalat di sekolah serta pembiasaan-pembiasaan yang lain seperti pembiasaan wudhu dengan tertib,

pembiasaan makan dengan keadaan duduk, pembiasaan hafalan serta budaya antri disegala aktivitas siswa.

Harapan dalam penerapan kebijakan *full day school* di masa yang akan datang khususnya di SMP IT Permata Bunda yaitu dapat menerapkan akhlakul karimah siswa di sekolah maupun di masyarakat.

Dari latar belakang masalah yang telah dideskripsikan sebelumnya maka kerangka berfikir penelitian ini terpola pada suatu alur pemikiran yang terkonsep seperti tampak pada bagan berikut:



Gambar 2.2 Bagan kerangka berfikir tentang adanya implementasi kebijakan *full day school* dalam upaya membentuk akhlak karimah siswa